



# Infrastruktur Prioritas APBD DKI Jakarta 2015 Disahkan Rp 73,08 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menangani banjir dan kemacetan lalu lintas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Kinerja anggaran akan terus digenjot agar terserap maksimal.

"Program prioritas untukantisipasi banjir dan macet, seperti untuk penguatan tanggul, pembangunan jalan inspeksi, dan penambahan ruang terbuka hijau," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sesau Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2015, Selasa (27/1).

Meski porsi anggaran terbesar tetap untuk pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan menjadi fokus penggunaan anggaran. Basuki akan mengubah strategi pengadaan lahan. Program ini sering kali gagal karena sengketa sehingga dana tidak terserap.

"Sebelumnya, kami tentukan lokasi lahan, taksir harga tanah, lalu terbitkan surat keputusan, baru dianggarkan. Tiba-tiba ada yang menggugat. Dana jadi tidak bisa dibayarkan. Sekarang kami balik. Kami siapkan anggaran, baru tentukan lokasi. Setelah Badan Pertanahan Nasional menyatakan tidak ada masalah, baru kami terbitkan surat keputusan untuk membayar," tutur Basuki.

Setelah tertunda sekitar satu bulan, akhirnya DPRD DKI Jakarta mengesahkan Peraturan Daerah tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015. Total anggaran yang disahkan senilai Rp 73,08 triliun, naik 0,24 persen dari APBD Perubahan 2014 sebesar

Rp 72,9 triliun.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta persetujuan lisan dari anggota Dewan yang hadir sebanyak 86 orang. Anggota Dewan setuju dan ketukan palu ketua menandai berakhirnya penantian eksekutif sejak 31 Desember 2014.

"Selama pembahasan, memang terjadi dinamika yang tidak bisa dihindari. Namun, kita semua patut bersyukur atas tercapainya kesepakatan tentang APBD 2015," kata Prasetyo.

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri akibat keterlambatan pengesahan APBD 2015. Seharusnya, APBD 2015 sudah diserahkan ke Kemendagri paling lambat akhir 2014.

## Catatan

Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan kepada eksekutif untuk diperhatikan dalam penggunaan APBD 2015. "Badan Anggaran menilai penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta masih menyisakan banyak masalah. Perlu diupayakan peningkatan fasilitas rumah sakit umum daerah agar modern dan lengkap," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Badan Anggaran juga menyoroti rencana pembangunan Stadion BMW yang masih menghadapi persoalan hukum, pemberian Kartu Jakarta Pintar yang belum mengakomodasi kelembagaan sekolah, pembebasan lahan yang belum terealisasi dengan cepat, dan persoalan sampah yang belum terselesaikan meski anggaran terus ditingkatkan.

Selain itu, lanjut Taufik, Badan Anggaran juga meminta eksekutif memperhatikan persoalan transportasi, seperti pengembangan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi dengan rencana tata ruang untuk meningkatkan pendapatan daerah, pengembangan sistem transpor-

tasi terpadu di Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata DKI Jakarta, perluasan dan penambahan jaringan jalan, penambahan armada bus transjakarta, serta penataan trayek dan peremajaan angkutan umum.

"Khusus proyek LRT (kereta ringan) yang dimasukkan dalam APBD 2015, kami memandang terlalu terburu-buru karena belum ada penjelasan tentang skema operasional dan subsidi tarif," ujar Taufik.

Rendahnya penyerapan APBD 2014 berdambak lesunya ekonomi Jakarta tahun lalu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan, berbagai perbaikan dibutuhkan agar penyerapan APBD 2015 bisa lebih baik sehingga pengerjaan proyek infrastruktur berjalan maksimal.

"Agar penyerapan anggaran optimal, perlu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa yang terjadwal baik," ujarnya saat konferensi pers Review Ekonomi DKI Jakarta 2014 dan Outlook 2015. (FRO/ART)



**Pendapatan daerah** [redacted] Rp 63,801 triliun

- Pendapatan asli daerah Rp 45,321 triliun
- Dana perimbangan Rp 11,408 triliun
- Lain-lain pendapatan yang sah Rp 7,071 triliun

**Belanja daerah** [redacted] Rp 67,447 triliun  
(Defisit Rp 3,645 triliun)

**Pembiayaan daerah**

Penerimaan [redacted] Rp 9,282 triliun

Pengeluaran [redacted] Rp 5,636 triliun

**5 NOVEMBER 2014**  
Pemerintah provinsi mengajukan RAPBD 2015 sebesar Rp 76,9 triliun kepada DPRD.

**21 NOVEMBER 2014**  
DPRD belum membahas RAPBD 2015 karena alat kelengkapan dewan berupa komisi dan badan belum terbentuk.

**9 DESEMBER 2014**  
DPRD menyusun jadwal pembahasan kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara APBD 2015. APBD 2015 ditargetkan akan disahkan dalam sidang paripurna 8 Januari 2015.

**10 DESEMBER 2014**  
DPRD menyoroti penyertaan modal untuk BUMD sebesar Rp 11,3 triliun karena belum memiliki kejelasan rencana bisnis BUMD.

**12 JANUARI 2015**  
Pemerintah provinsi melakukan koreksi terhadap beberapa mata anggaran. Dana penyertaan modal untuk BUMD menjadi hanya Rp 6,6 triliun untuk dua BUMD dari usulan sebelumnya delapan.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DKI JAKARTA 2015**

**20 JANUARI 2015**  
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna.

**27 JANUARI 2015**  
APBD DKI 2015 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan disetujui senilai Rp 73,08 triliun.

Sumber: Litbang "Kompas"/STI, diolah dari pemberitaan "Kompas" dan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta

NOVAN